

CHECKSHEET KONTRAK

協定書見直しチェックリスト

JUDUL KONTRAK

協定名 : Perjanjian Jual Beli
 NO. KONTRAK : SAMIJF/LKM-LA/03-2023/017
 協定番号 :
 PARA PIHAK : PT. ATLAS COPCO INDONESIA & PT. SAMI - JF
 署名者 : MTP JF
 PIC/USER :
 PIC/ユーザー :
 TANGGAL CEK : 04 April 2023
 確認日 :
 CEK KE : Satu
 確認目 :

User		
Approved	Checked	Prepared
Manager	SPV	LL
Inisial Date KAK 17/4/2023	HAR	DWA
		AMO
		4/4/23
Legal		
Approved	Checked	Prepared
Manager	SPV	LL
Inisial Date SPK	MMU	

作成 Created by STI
 Rev. 04
 Date : 29 October 2019
 No. Doc : SAMI/LA/CS01

A. LEGALITAS CHECK

Beri tanda "V" jika ada dan Beri tanda "x" jika tidak ada

- | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1. Akta Perusahaan
本公書証 | <input checked="" type="checkbox"/> | 2. SIUP
企業許可書 | <input type="checkbox"/> | 3. TDP/NIB
企業申告書 | <input checked="" type="checkbox"/> | 4. NPWP
税金番号 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5. KTP Penanggung Jawab
責任者身分證明書 | <input checked="" type="checkbox"/> | 6. SK MENKUMHAM
法律及び権利大臣決定書 | <input checked="" type="checkbox"/> | 7. Domisili Usaha
企業在有 | <input checked="" type="checkbox"/> | | |

B. REVIEW CHECK

isi pada kolom "evaluasi" dan "n/PP"

Beri tanda "V" jika ada, tuliskan halaman atau pasal terkait

Beri tanda "x" jika tidak ada, berikan penjelasan

Beri tanda "N/A" jika tidak dibutuhkan, berikan penjelasan

NO	ITEM CEK 項目チェック	CEK POIN 確認するポイント	EVALUASI 評価	REMARK 備考
1	JUDUL タイトル	- Apakah sudah ada judul kontrak ? Jika ada, pastikan judul kontrak sesuai dengan isi kontrak - 協定名がありましたか? あつたら、協定名と内容があってるかどうか確認してください。	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	No. Kontrak 協定番号	- Apakah sudah ada nomor kontrak yang dikeluarkan oleh legal? - Legal課が提出した協定番号がありますか?	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Para Pihak 署名者	Apakah sudah dicantumkan identitas Para Pihak dengan jelas ? (Nama, Alamat, Jabatan) Check Point: Pastikan Pihak yang menandatangani tercantum dalam akta, jika tidak, harus dengan surat kuasa署名者の身分がはっきり書かれていましたか? (氏名、住所、役職) 確認するポイント: 署名した署名者は書証に載っているかどうか、確認してください。載っていない場合、認定を付かなければならぬ。	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	Legalitas & Tujuan 背景・目的	Apakah ada pernyataan keabsahan perusahaan dan objek kerjasama ? Check point: - Pastikan perusahaan bukan ilegal (check akta) - Pastikan objek yang dijual tidak dalam sengketa hukum 協力対象と会社の合法性がありましたか? 確認するポイント: - 非合法会社じゃないことを確認する。（証書を確認する） - 販売された対象は係争物じゃないことを確認する。	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	Kesepakatan 合意	Apakah sudah ada klausul kesepakatan ? 合意条項がありましたか?	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	Ruang Lingkup 適用範囲	Cakupan umum tentang kerjasama tersebut. Check point: Pastikan Para Pihak sesuai dengan bidang kerjasama 協力についての大筋。 確認するポイント: 署名者は協力分野通りということを確認する。	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	Definisi 定義	Penjelasan istilah asing/khusus yang membutuhkan penjelasan detail. Check point: Pastikan setiap kalimat/atau kata asing yang ada dapat dipahami 特定な用語／外国語の言葉は詳細な説明が必要。 確認するポイント: 外国の言葉や文が理解できることを確認する。	<input checked="" type="checkbox"/>	
8	Objek オブジェクト	Apakah objek sudah dicantumkan dengan jelas ? (nama, jumlah, harga, kualitas) 対象ははっきり書かれてましたか? (品名、数量、値段、品質)	<input checked="" type="checkbox"/>	
9	Periode 期間	Pastikan waktu mulai dan berakhirnya perjanjian ada. 契約期間があったことを確認する。	<input checked="" type="checkbox"/>	
10	Pembayaran 支払い	Apakah metode pembayaran sudah dicantumkan ? - termin pembayaran, misal: termin 1 (10%), termin 2 (60%), Termin 3 (20%) dan retensi (10%) - Alamat pembayaran (No. rekening bank, alamat bank, nama no.rekerning, nama bank) 支払方法が書かれていましたか? - 支払い条件。例：一回目(10%)、二回目(60%)、三回目(20%)、停滞(10%) - 支払いの宛先（口座番号、銀行住所、口座名、銀行名）	<input checked="" type="checkbox"/>	

ITEM CEK 項目チェック	CEK POIN 確認するポイント	EVALUASI 評価	REMARK 備考
11 Garansi/ Jaminan 保証 Kualitas barang 品質	Apakah sudah ada garansi ? Check point: Pastikan ada jaminan kualitas barang dan jaminan jika tidak tercapai kualitas yang dijanjikan 保証はありましたか? 確認するポイント： 品質保証と合意した質になつてない場合の保証があったことを確認する。	✓	
12 Pengiriman/ Pengerjaan 運送又は仕上がり	Apakah sudah ada jadwal pengiriman/ atau pengerjaan ? Check point: Pastikan waktu pasti pengiriman atau penyelesaian pekerjaan. Khusus untuk pekerjaan pemborong (listrik, building, cv dll) harus ada rencana aktivitas (activity plan) 運送又は仕上がりのスケジュールがありましたか? 確認するポイント： 運送又は仕上がりの期間を確認する。 一括仕事（電気、ビル、コンペアなど）の場合、アクティヴィティーブランがなければならぬ。	✓	
13 Lingkungan 環境	Apakah ada ketentuan tentang K3/B3 ? Check point: - Pekerjaan (pemborong) wajib mencantumkan ketentuan K3 serta sanksinya - Barang yang mengandung B3 wajib mencantumkan ketentuan dan sanksi pelanggaran. 労働安全衛生に関する定め／有毒危険物についての基準がありましたか? 確認するポイント： - 業者は労働安全衛生に関する定めと違反の制裁を書かなければならぬ。 - 有毒危険物があったら、その基準と違反の制裁を書かなければならぬ。	✓	
14 Keamanan Informasi 情報安全	Apakah kontrak mencantumkan ISMS ? Check point: - Pastikan ada NDA (non disclosure agreement) dengan perusahaan yang bekerjasama - Pastikan kontrak kerjasama mencantumkan ISMS/ keamanan informasi 契約書には情報セキュリティマネジメントシステムがありましたか? 確認するポイント： - 協力する会社との非開示契約があることを確認する。 - 契約書に情報セキュリティマネジメントシステムが書かれていることを確認する。	✓	
15 Sanksi 制裁	Apakah ada sanksi atas pelanggaran perjanjian ini ? Check point: Pastikan setiap item yang dijanjikan dalam kontrak terlaksana, apabila tidak dapat dilaksanakan dikenakan sanksi. Pastikan waktu pemenuhan sanksi tercantum. 契約に対して違反の制裁がありましたか? 確認するポイント： 契約に合意した通り仕上げることを確認する。合意通りに仕上げられない場合、制裁を受けける。 制裁を受ける期間が書かれていることを確認する。	✓	
16 Sub-Kontrak 下請け協定	Apakah ada jaminan untuk tidak di sub-kontrak ? 下請けにならない保証がありましたか?	✓	
17 Pengakhiran 解除	Apakah dijelaskan cara mengakhiri perjanjian ? Check point: Ketentuan yang memberikan wewenang pemutusan kontrak dalam pelanggaran atau kebangkrutan dari pihak lain 契約の解除が説明されましたか。 確認するポイント： 協定違反又は赤字により協定を解除する権利の定めである。	✓	
18 Addendum 補遺	Apakah sudah tercantum prosedur addendum ? Check point: Addendum harus berdasarkan persetujuan Para Pihak 補遺の手順がありましたか? 確認するポイント： 補遺は署名者の合意通りにならなければならない。	✓	
19 Korespondensi 情報通信	Apakah nama, alamat, nomor telfon dan email PIC pelaksana sudah ada ? 署名者の氏名、住所、電話番号とメールがありましたか?	✓	
20 Tempat Penyelesaikan Sengketa 問題解決所	apakah tatacara penyelesaian sengketa sudah ada ? Check point: Penyelesaian sengketa dengan tahapan: - musyawarah mufakat - pengadilan di semarang 紛争の解決方法がありましたか? 確認するポイント： - 署名者との話し合い - スマラン市裁判所	✓	
21 Ketentuan Lain その他	Apakah ada ketentuan lain yang dicantumkan ? Check point: Pastikan berlakunya lampiran-lampiran dan ketentuan lain terhubung dengan kontrak その他の条件がありましたか? 確認するポイント： その他の条件と添付が契約に関係があることを確認する。	✓	

PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA
antara
PT. ATLAS COPCO INDONESIA
dengan
PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA -
JEPARA FACTORY (PT. SAMI-JF)

SAMI-JF/LKM-LA/03-2023/017

Pada hari Jumat tanggal Tiga puluh satu bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh tiga (31-03-2023) bertempat di Jepara, telah disepakati perjanjian kerjasama oleh dan antara:

Nama : **Aryashree Dipayan**
Jabatan : Direktur PT. Atlas Copco Indonesia
Alamat : Cilandak Commercial Estate KAV 203. Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta 12560

Bertindak untuk dan atas nama PT. Atlas Copco Indonesia untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Kawasaki Nozomi**
Jabatan : Direktur PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia - Jepara Factory (PT. SAMI-JF)
Alamat : Jl.Raya Jepara Kudus KM 28 Ds. Sengon bugel, Kec. Mayong Kab. Jepara
Bertindak untuk dan atas nama PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** masing - masing disebut **Pihak** dan secara bersama - sama disebut **Para Pihak**.

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- **Pihak Pertama** adalah perusahaan yang bergerak dalam penyedia kompresor udara, alat industri, peralatan konstruksi dan alat-alat pertambangan sesuai Akta No.07 tanggal 07 November 2019 yang dibuat dihadapan Emmernesia Siti Preti Pertiwi Salamah sebagai Notaris dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-0093977.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 14-11-2019 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai **PENJUAL**.
- **Pihak Kedua** adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing perakitan kabel kendaraan roda empat atau lebih sesuai Akta pendirian No. 2 Tanggal 7 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C.03916 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Maret 2002 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai **PEMBELI**.

Berdasarkan hal-hal diatas maka dengan ini **Para Pihak** sepakat membuat perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
<i>F</i>	<i>OS</i>	<i>Muf</i>	<i>ZD</i>

Pasal 1
Obyek Perjanjian & Harga

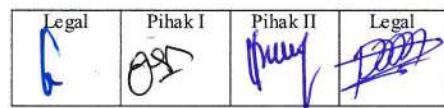
- (1) Objek perjanjian ini adalah pembelian/pengadaan Ers, Cvir, Power Cord di PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia dengan detail produk :

No	Part Name	Harga
1	Ers12-M20	Rp. 74.567.610,-
2	Cvir II	Rp. 85.000.000,-
3	Power Cord C19 16a/250v Europe	Rp. 603.915,-
Total Pembelian		Rp. 160.171.525,-

- (2) Jumlah dan jenis barang yang dipesan sesuai PO (Purchase Order) dari **Pihak Kedua** dan untuk produk yang tidak disebutkan pada ayat di atas, harus berdasarkan surat penawaran yang disetujui **Para Pihak**.
(3) Harga dalam ayat 1 di atas belum termasuk pajak (PPN), PPN ditanggung **Pihak Kedua**.
(4) Harga dalam ayat 1 di atas berlaku selama waktu perjanjian .
(5) Apabila ada kenaikan harga dari harga sebelumnya, maka harus diinformasikan minimal dua bulan sebelum kenaikan harga.
(6) Jika tidak ada informasi terkait kenaikan harga sesuai ayat (5), maka harga yang digunakan adalah harga sebelum kenaikan.
(7) Semua lampiran maupun surat penawaran yang muncul selama periode perjanjian, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

Pasal 2
Pengiriman

- (1) Biaya transportasi yang timbul dari tempat **Pihak Pertama** ke tempat **Pihak Kedua** sepenuhnya menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.
(2) Resiko kerusakan akibat proses pengiriman menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.
(3) Jumlah barang dan waktu pengiriman harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan di Purchase Order yang diterbitkan oleh **Pihak Kedua**.
(4) Apabila **Pihak Pertama** akan melakukan pengiriman barang kepada **Pihak Kedua** melebihi waktu atau tidak pada hari kerja yang telah ditentukan maka **Pihak Pertama** harus menginformasikan kepada **Pihak Kedua** terlebih dahulu.
(5) Batas waktu pengiriman barang sesuai dengan jadwal yang sudah disetujui **Para Pihak**.
(6) Apabila terjadi keterlambatan dalam pengiriman, maka **Pihak Pertama** wajib membayar biaya keterlambatan 1% (satu persen) per hari keterlambatan dan maksimal 5% (lima persen) dari total harga obyek perjanjian.
(7) Pembayaran ayat (6) paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tagihan klaim diterima oleh Pihak Pertama.
(8) **Para Pihak** sepakat sebelum dilakukan penyerahan obyek perjanjian dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**, telah dilakukan pengecekan barang (jumlah, kualitas, dll) antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.



Pasal 3
Jaminan Kualitas Produk

- (1) **Pihak Pertama** menjamin seluruh obyek yang dikirim kepada **Pihak Kedua** sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh **Para Pihak**.
- (2) **Pihak Pertama** menjamin seluruh obyek yang dikirim kepada **Pihak Kedua** sesuai dengan standar produk yang baik.
- (3) **Pihak Pertama** bersedia mengganti bagian obyek yang telah dikirim jika tidak sesuai sebagaimana dalam ayat (1) dan (2).
- (4) **Pihak Pertama** bersedia memberikan garansi selama 12 bulan terhitung sejak berita acara diterima dan ditandatangani oleh **Kedua Belah Pihak**.
- (5) **Pihak Pertama** memberikan garansi 100% atas obyek yang cacat atau tidak sesuai spesifikasi.

Pasal 4
Kewajiban dan Hak Pihak Pertama

- (1) **Pihak Pertama** berhak menerima pembayaran dari **Pihak Kedua** sesuai waktu yang telah disepakati **Para Pihak**.
- (2) **Pihak Pertama** wajib menyerahkan obyek perjanjian sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati **Para Pihak**.
- (3) **Pihak Pertama** tidak diperbolehkan mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain tanpa sepenuhnya dan atau persetujuan tertulis dari **Pihak Kedua**.

Pasal 5
Kewajiban dan Hak Pihak Kedua

- (1) **Pihak Kedua** wajib membayar tepat waktu sesuai perjanjian.
- (2) **Pihak Kedua** berhak menerima obyek perjanjian sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati **Para Pihak**.
- (3) **Pihak Kedua** berhak atas garansi yang diberikan oleh **Pihak Pertama**.

Pasal 6
Tata Cara Pembayaran

- (1) Pembayaran **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dilakukan dengan cara transfer bank ke nomor rekening:
 - Nomor rekening : 0003988-00-0 (IDR)
 - Atas nama : PT. Atlas Copco Indonesia
 - Nama Bank : Deutsche Bank AG, Jakarta Branch
- (2) **Pihak Kedua** akan melakukan pembayaran kepada **Pihak Pertama** dengan dua kali pembayaran :
 - a. Tahap I (pertama) sebesar **50%** dari nilai obyek perjanjian dalam pasal 1 (satu) ayat 1 (satu) yaitu sebesar **Rp. 80.085.762,5** (Delapan puluh juta delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh dua koma lima rupiah), setelah pengiriman Purchase Order. Pembayaran tahap I dilaksanakan setelah invoice diterima dan terhitung 30 (tiga puluh) hari setelah voucher paying masuk finance.
 - b. Tahap II (kedua) sebesar **50%** dari nilai obyek perjanjian dalam pasal 1 (satu) ayat 1 (satu) yaitu sebesar **Rp. 80.085.762,5** (Delapan puluh juta delapan puluh lima ribu

Legal 	Pihak I 	Pihak II 	Legal
-----------	-------------	--------------	-----------

tujuh ratus enam puluh dua koma lima rupiah), sebelum proses pengiriman alat. Pembayaran tahap II dilaksanakan setelah invoice diterima dan terhitung 30 (tiga puluh) hari setelah voucher paying masuk finance.

Pasal 7 **Waktu Perjanjian**

- (1) Perjanjian ini berlaku selama satu (1) tahun sejak tanggal disepakati.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang secara otomatis untuk satu (1) tahun berikutnya kecuali ada pemberitahuan dari salah satu pihak secara tertulis untuk mengakhiri atau merubah perjanjian ini 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa 1 (satu) tahun Perjanjian ini atau masa perpanjangannya.

Pasal 8 **Force Majeure**

- (1) **Para Pihak** tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang Timbul diakibatkan oleh force majeure.
- (2) Kondisi yang dapat diterima sebagai force majeure oleh kedua belah pihak adalah Perang, terorisme, penutupan oleh pemerintah, bencana alam yang dikategorikan sebagai bencana nasional yang dibuktikan dengan ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Pemberitahuan kejadian force majeure dibuat secara tertulis maksimal dalam waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal kejadian didukung dengan bukti.
- (4) Pemberitahuan kejadian force majeure diterima **Pihak Pertama** atau **Pihak Kedua** dan ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan force majeure. Apabila pemberitahuan tersebut tidak ditanggapi maka dianggap telah menerima kejadian force majeure tersebut.

Pasal 9 **Sistem Keamanan Informasi**

- (1) **Para Pihak** sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian ini dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan perjanjian ini, saat ini dan atau dikemudian hari setelah berakhirnya perjanjian kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) **Para Pihak** tidak akan membuka kerahasiaan informasi perusahaan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani atasan tertinggi dari masing-masing **Pihak**. (Seperti upload gambar/ video ke media sosial, dll).
- (3) Apabila **Pihak Pertama** membocorkan dan/atau menyebarluaskan kerahasiaan informasi perusahaan **Pihak Kedua** seperti halnya drawing, sample produk, berkas dokumen ordering, dan dokumen lainnya dari **Pihak Kedua** yang mengakibatkan kerugian **Pihak Kedua**, maka **Pihak Pertama** wajib membayar seluruh kerugian yang diderita oleh **Pihak Kedua**.
- (4) **Pihak Pertama** berperan serta menjaga asset **Pihak Kedua**.
- (5) **Pihak Pertama** dilarang mengambil gambar/video dalam bentuk apapun selain untuk kepentingan **Pihak Kedua**.

Legal 	Pihak I 	Pihak II 	Legal
-----------	-------------	--------------	-----------

- (6) **Pihak Pertama** dilarang memasuki area yang bukan area kerjanya dan mengakses system informasi tanpa seijin **Pihak Kedua**.
- (7) **Pihak Pertama** wajib menyampaikan semua ketentuan ini kepada semua karyawan yang berkaitan dengan perjanjian ini.

Pasal 10

Pemberian Hadiah atau Janji

- (1) **Pihak Pertama** dilarang untuk memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang atau bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat Pribadi kepada staff atau karyawan **Pihak Kedua** terkait perjanjian ini.
- (2) Sanksi atas pelanggaran ayat 1 (satu) pasal ini kepada **Pihak Pertama** adalah:
 - a. Pemutusan perjanjian secara sepah oleh **Pihak Kedua**.
 - b. Karyawan **Pihak Pertama** yang terlibat dalam pemberian hadiah akan dikeluarkan dari perusahaan **Pihak Pertama**.
 - c. Karyawan **Pihak Kedua** yang terlibat dalam penerimaan hadiah akan diproses sesuai PKB (Peraturan Kerja Bersama) yang berlaku di tempat **Pihak Kedua**.
 - d. **Pihak Pertama** mengembalikan semua pembayaran yang telah diberikan oleh **Pihak Kedua**.
 - e. **Pihak Kedua** berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 11

Pengakhiran Perjanjian

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir dikarenakan sebagai berikut:
 - a. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri.
 - b. Periode perjanjian telah berakhir.
 - c. Salah satu Pihak cidera janji.
 - d. Dengan putusan pengadilan.
 - e. Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut/pailit.
- (2) Pengakhiran perjanjian dalam ayat (1) poin (a), poin (b) dan poin (c) harus dengan memberitahu/diberitahu terlebih dahulu kepada Para Pihak selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan.

Pasal 12

Penyelesaian Permasalahan

- (1) Jika terjadi permasalahan selain yang tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan dengan etikat baik dengan musyawarah secara mufakat.

Pasal 13

Pernyataan dan Jaminan Kepatuhan Regulasi

Para Pihak menjamin dan menyatakan bahwa:

- (1) Dalam pelaksanaan perjanjian ini mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Usia pekerja yang dipekerjakan di perusahaan masing-masing **Pihak**, tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang Undang Ketenagakerjaan.

Legal 	Pihak I 	Pihak II 	Legal
-----------	-------------	--------------	-----------

- (3) Dalam hal terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh salah satu **Pihak**, maka **Para Pihak** sepakat untuk tidak melibatkan Pihak yang lain dalam kasus pelanggaran peraturan tersebut.

Pasal 14 Ketentuan Lain

(1) Perubahan Perjanjian

- Setiap syarat dan ketentuan yang belum atau tidak diatur dalam perjanjian akan dibicarakan, dinegosiasikan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.
- Segala perubahan dan atau penambahan isi perjanjian tidak berlaku kecuali disepakati secara tertulis oleh **Para Pihak** sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

(2) Korespondensi atau pemberitahuan

Setiap korespondensi akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, surat elektronik atau diserahkan langsung dan dialamatkan ke:

Pihak Pertama : PT. Atlas Copco Indonesia

Alamat : Cilandak Commercial Estate KAV 203. Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta 12560

Telepon : 021-780 1008

Email : ocsha.netria@desouttertools.com

Up : Ibu Ocsha

Pihak Kedua : PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia- Jepara Factory

Alamat : Jl. Raya Jepara Kudus KM. 28 Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong, Kab. Jepara

Telepon : (0291) 7512101

Email : dian_w@sami-jf.co.id

Up : Dian Wahyuni

Setiap pemberitahuan atau korespondensi pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada hari ke-lima pada hari kerja setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan menyerahkan langsung pada saat diserahkan.

(3) Pengecualian.

Apabila terjadi pemutusan atau pembatalan terhadap perjanjian, **Para Pihak** sepakat mengabaikan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

(4) Hukum yang berlaku

- Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk dan patuh pada ketentuan/peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

- Apabila dikemudian hari terbit perundangan baru, agar pasal-pasal dalam perjanjian ini tidak bertentangan dengan perundangan baru tersebut, maka akan dimusyawarahkan kembali oleh **Para Pihak** dengan tidak membatalkan perjanjian ini.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

Demikian perjanjianini dibuat rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diatas meterai yang cukup satu untuk **Pihak Pertama** dan satu untuk **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA
PT. ATLAS COPCO INDONESIA


Aryashree Dipayan
Direktur 

PIHAK KEDUA
PT. SEMARANG AUTOCOMP
MANUFACTURING INDONESIA
JEPARA FACTORY



Kawasaki Nozomi
Direktur

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

Demikian perjanjianini dibuat rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diatas meterai yang cukup satu untuk **Pihak Pertama** dan satu untuk **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA
PT. ATLAS COPCO INDONESIA



Aryashree Dipayan
Direktur

PIHAK KEDUA
PT. SEMARANG AUTOCOMP
MANUFACTURING INDONESIA
JEPARA FACTORY



Kawasaki Nozomi
Direktur